

## DAFTAR REFERENSI

### I. Buku, Makalah dan Jurnal

- Abdul Bari Azed, *Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia*, Pusat Studi HTN Universitas Indonesia, 2005.
- Afan Gaffar, Syaukani, Ryaas Rashid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Agung Djokosoekarto, *Membangun Kepemimpinan Lokal Yang Demokratis*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003
- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, 2005, hal 125.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta 1995, hal
- Bambang Widjojanto, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah : Upaya Mendorong Proses Demokratisasi*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003
- CST Kansil dan Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 178.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Jogjakarta, 1999, hal 24
- Eko Prasodjo, *Menghapus Pilkada Langsung*, Pebruari 2008,  
Sumber: [id.buck1.com/politik-hukum/menghapus-pilkadalangsung](http://id.buck1.com/politik-hukum/menghapus-pilkadalangsung)
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FHUII Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Kacung Marijan, *Resiko Politik, Biaya Ekonomi Akuntabilitas Politik dan*

*Demokrasi Lokal*, Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, Jakarta, 2007, hal 16.

Lili Hasanudin, *Pemilihan langsung Kepala daerah menuju terwujudnya pemerintahan lokal yang demokratis di Indonesia*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003

Maruarar Siahaan, *Pilkada Dalam Demokrasi Transisional*, Jurnal Konstitusi Vol.2 Nomor 1 Juli 2005

M. Alim, *Hukum Acara MK Dalam Pemilikada* disampaikan dalam Diklat Panitera Pengganti, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 23 November 2008.

Paulus Effendi Lotulung, , *Aspek Yuridis Dalam Masalah Sengketa Pilkada*, LPP-HAN, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta 1981, hal.46.

\_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004. hal 14

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2004, hal 86.

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005. hal 124

Smita Notosusanto, *Mencermati Kecurangan Sistematis UU Pemda*, (dalam) Topo Santoso, membongkar Kontroversi Pilkada Depok Kepala Daerah Pilihan Hakim, Syamil Cipta Media Bandung, 2005

Zain badjeber, dalam bukunya terbitan Forum Indonesia Maju, Himpunan Anggota DPR RI 1999-2004, edisi revisi, hal 246

## II. Publikasi Elektronik

Berpolitik.Com, *44,7 Persen Kasus Pilkada ke Pengadilan*, 19 Juni 2008

Gatra.Com, *Seluruh Perkara Pilkada Dilimpahkan ke MK*, 29 Oktober 2008

Hukum Online, *KPU Anggap Pemerintah Belum Ikhlas Lepas Pilkada*, 11 Maret 2008.

Inilah.Com, *Giliran MK urus Sengketa Pilkada*, 19 Maret 2008.

- Indonesia File.Com, *Kejar Target Pemilu Mepet*, 12 April 2008.
- Kompas, *MK Gagal Mengawal Demokrasi*, 30 Maret 2005
- Kompas, *Rezim Pemilu dan Pemda masih jadi Perdebatan*, 2 Pebruari 2006
- Kompas, *MK Siap Tangani Sengketa Pilkada*, 8 April 2008
- Kompas, *MK Selesaikan Sengketa Pilkada?*, 23 April 2008
- Koran Tempo, *Bagir Manan Kritik Pengalihan Sengketa Pilkada*, 9 April 2008
- Mimbar Opini.Com, *Pilkada Damai Impian Kita Bersama*, April 2008
- News.Okezone.com, *MK Siap Ambil Alih Kasus Pilkada*, 17 Pebruari 2008
- Pikiran Rakyat Online, *Pilkada Pasca Oktober Akan Dipercepat*, 19 April 2008
- Sinar Harapan, *Depdagri:Pilkada Bukan Pemilu*, 30 Desember 2005.
- Suara Pembaharuan, *Memperpendek Jalur Sengketa Pilkada*, 6 Maret 2008
- Suara Karya Online, *Masyarakat Diingatkan Jangan Alergi*, 22 April 2008
- Suara Karya Online, *MK Siap Tangani Sengketa Pilkada*, 30 Oktober 2008
- Solopos, *MK hanya Tangani Sengketa Suara*, 31 Oktober 2008
- Waspada Online, *Hormati Pilihan Rakyat Sumut*, April 2008

### III. Karya Lain

- Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 01/PK/PIKADA/2005 tentang Sengketa Pilkada Kota Depok
- Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 02/PK/PILKADA/2008 tentang Sengketa Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan
- Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 03/KPUD/2007 tentang Sengketa Pilkada Maluku Utara
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 17/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

